

## BAB II

### A. Gambaran Geografis Kabupaten Kulon Progo

#### 1. Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas lima kabupaten/kota yaitu

- a. Yogyakarta Kota.
- b. Kabupaten Sleman.
- c. Kabupaten Bantul.
- d. Kabupaten Sleman.
- e. Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo merupakan Kabupaten yang berada dibagian paling barat dari wilayah DIY. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. Timur : berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman dan Bantul  
Propinsi DIY
- b. Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia
- c. Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa  
Tengah
- d. Utara : berbatasan dengan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

<sup>16</sup> <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/kulonprogoda08.pdf> diakses tel 16 Juni 2012

Peta I. Kabupaten Kulon Progo dan Rencana Tata Ruang Kabupaten<sup>17</sup>



<sup>17</sup> *Tanggapan KA-ANDAL Pertambangan Riji Resi PT. IMI Kulon Progo*, Yogyakarta : Walhi, 2011

Kabupaten Kulon Progo juga memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu :

Table 1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kulon Progo<sup>18</sup>

Bagian Utara	Merupakan dataran tinggi/perbukitan menengah dengan ketinggian antara 500-1.000 meter dari permukaan laut yang meliputi Kecamatan Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh. Dijadikan kawasan konservasi dan rawan terjadinya tanah longsor.
Bagian Tengah	Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Sentolo, Pengasih dan Kokap.
Bagian Selatan	Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah yang merupakan kawasan rawan bencana banjir pada musim hujan.

Batas-batas koordinat topografi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- a. Barat : 110° Bujur Timur 1' 37"
- b. Timur : 110° Bujur Timur 16' 26"
- c. Utara : 7° Lintang Selatan 38' 42"
- d. Selatan: 7° Lintang Selatan 59' 3" <sup>19</sup>

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Untuk penggunaan tanah di Kulon Progo meliputi penggunaan tanah untuk :

- a. Persawahan seluas 10.372,04 Ha (18,30%).
- b. Tegalan seluas 7.145,42 Ha (12,19%).
- c. Kebun campur seluas 31.131,81 Ha (53,20%).
- d. Perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%).
- e. Hutan seluas 1.025 Ha (1,75%).
- f. Perkebunan rakyat seluas 486 Ha (0,80%).
- g. Tanah tandus seluas 1.225 Ha (1,75%).
- h. Waduk seluas 197 Ha (0,34%).
- i. Tambak 50 Ha (0,09%).

j. Dan tanah-tanah lain seluas 3.315 Ha (5,65%).<sup>20</sup>

Bentuk morfologi didaerah bagian selatan berupa dataran pantai, dataran rendah dan semakin ke utara merupakan dataran bergelombang dan perbukitan. Daerah pegunungan berada diwilayah utara dan barat serta lereng selatan dari rangkaian pegunungan yang bisa disebut dengan pegunungan menoreh.

Arah perkembangan Kabupaten Kulon Progo seperti yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2003 tentang rencana tata ruang dan wilayah daerah tahun 2003-2013 sesuai dengan hirarkinya dijelaskan sebagai berikut :

A. Hirarki kota-kota di Kabupaten Kulon Progo.

A. Hirarki I adalah kota Wates yang meliputi sebagian Kecamatan Wates dan sebagian Kecamatan Pengasih sebagai pusat kegiatan yang melayani seluruh wilayah kabupaten yang berada dibawahnya. Direncanakan melalui :

- a. Pemantapan keterkaitan dengan kota-kota hirarki II dan III serta kota-kota pada wilayah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat untuk memperlancar arus lalu lintas.
- b. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memanfaatkan fungsi kota sebagai penahan arus urbanisasi dan migrasi penduduk untuk keluar daerah.

- d. Peningkatan penataan ruang kota dan penataan bangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian oleh semua pihak.
- e. Pengembangan sektor pertanian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
- f. Meningkatkan peran sebagai pusat pertumbuhan daerah barat dan Propinsi DIY

B. Hirarki II terdiri dari kota Temon, Sentolo, Nanggulan, Brosot dan Dekso. Direncanakan sebagai pusat kegiatan tingkat II yang melayani wilayah yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya direncanakan melalui :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui upaya sektor swadaya masyarakat maupun swasta.
- c. Pengembangan sektor pertanian dan sektor perdagangan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan pengusaha menengah kecil dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk.
- d. Pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan dan lingkungan pemukiman).

- e. Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dengan kota-kota hirarki I, II dan III serta wilayah-wilayah perbatasan.
- C. Hirarki III terdiri dari kota Lendah, Kokap, Panjatan, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (wilayah Kecamatan) yang melayani daerah sendiri dan Direncanakan melalui :
- a. Peningkatan kualitas hidup dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pemanfaatan lembaga pedesaan pengadaan pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalanan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman).
  - c. Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan kota-kota hirarki I, II dan III serta wilayah perbatasan.

Kemudian pola pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan manfaat utama lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kehidupan dan penghidupan. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Kulon Progo dibagi dalam beberapa kelompok meliputi : kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan serta kawasan rawan bencana.

- b. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian penduduk. Kawasan budidaya secara garis besar dikelompokkan meliputi : kawasan pertanian, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan peruntukan industri dan kawasan pertambangan.
- c. Lokasi Militer, merupakan lokasi yang diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebijakan pemanfaatan lokasi militer sepenuhnya pada instansi yang berwenang<sup>21</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut perhitungan cepat yang dilaksanakan oleh BPS Kulon Progo pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk sebanyak 388.755 jiwa dari 3.452.390 seluruh penduduk DIY yang terdiri dari 190.550 laki-laki dan 198.205 perempuan<sup>22</sup>.

Pada umumnya masyarakat Kulon Progo bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Tercatat semenjak tahun 2004 ketahanan pangan selalu dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi padi pada tahun 2004 sebesar 103.210.760 kg gabah kering giling (GKG) atau setara beras 67.047.990 kg sehingga menghasilkan surplus sebesar 29.423.840 kg<sup>23</sup>. Selain itu perdagangan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kulon Progo. Pada tahun 2005 terdapat 73 unit pasar yang meliputi 35 pasar milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan 38 unit pasar desa.

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> [http://www.kulonprogokab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=30&itemid=79](http://www.kulonprogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30&itemid=79) diakses tgl 6 Juni 2012

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo no. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Kondisi sosial ekonomi penduduk di daerah penelitian dapat ditelaah dengan berdasarkan pada jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Jika kita melihat pada tingkat pekerjaan, jenis utama utama pekerjaan kepala keluarga adalah bekerja sebagai petani, baik sebagai petani pemilik, petani penggarap ataupun sebagai buruh tani. Bertani menjadi pekerjaan utama meskipun secara geografis domisili mereka berdekatan dengan laut.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan Negara. Di Kabupaten Kulon Progo tingkat buta aksara mencapai 2,59 %. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyandang buta aksara di Kabupaten Sleman 1,00% atau dengan kota Yogyakarta yang jumlah penyandang buta aksara sebanyak 0,16 % dan merupakan yang terendah di Propinsi DIY disusul terendah kedua Kabupaten Bantul. Namun penyandang buta aksara di Kabupaten Kulon Progo masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten Gunung Kidul yang jumlah penyandang buta aksaranya mencapai 3,324% dan jumlah ini merupakan jumlah tertinggi yang diperoleh BPS di Propinsi DIY<sup>24</sup>.

Secara teori, penduduk buta aksara dapat terjadi karena lokasi penduduk yang sulit dijangkau sehingga akses pendidikan menjadi sangat sulit. Pernyataan tersebut dianggap benar jika kita melihat contoh pada Kabupaten Gunung Kidul yang akses untuk menjangkau wilayah-wilayah termasuk sulit pada wilayah-wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wilayah yang termasuk dalam wilayah-wilayah pegunungan, namun tentu tidak demikian halnya dengan daerah Kabupaten Kulon Progo.

Data menunjukkan bahwa peringkat tiga besar presentase buta aksara yaitu di Kecamatan Galur sebanyak 5,1 %, di Kecamatan Wates sebanyak 4,8 % dan di Kecamatan Sentolo sebanyak 4,0 %. Padahal jika dilihat tiga Kecamatan tersebut merupakan Kecamatan dengan kondisi ekonomi sosialnya relatif baik bila dibandingkan dengan Girimulyo atau Samigaluh yang wilayahnya merupakan wilayah pegunungan dan memiliki akses transportasi yang relatif lebih sulit.

Mobilitas penduduk Kabupaten Kulon Progo juga tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok produktif menunjukkan efektivitas penduduk yang tinggi.

## **2. Sejarah Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo dahulu merupakan daerah yang dibagi dalam dua kekuasaan yakni wilayah utara dan selatan. Wilayah utara adalah wilayah keSultanan dengan nama Kabupaten Kulon Progo dan wilayah selatan merupakan kekuasaan Pakualaman dengan nama Kabupaten Adikarta.

### **1. Wilayah Utara**

Sebelum perang Diponegoro tahun 1825-1830, didaerah Naragung yang termasuk kedalam Kabupaten Kulon Progo sebagai pejabat penguasa pemerintah adalah pepatih dalem. Pada masa sesudah tahun 1930 mulai dibentuk pemerintahan yang dibagi menjadi empat kabupaten mini diantaranya 1) tahun 1831 Kabupaten Pengasih dan Sentolo, 2) ditahun 1851 Kabupaten Nanggulan 3) tahun 1855 Kabupaten Kalibawang. Pada tahun 1912

terjadi penggabungan empat kabupaten dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Pengasih. Pada tanggal 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi dua distrik, pengasih yang membawahi distrik yaitu Pengasih, Lendah, Sentolo dan Sermo. Distrik Nanggulan membawahi empat order distrik juga yaitu Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang dan samigaluh.

## 2. Wilayah Selatan

Pada tahun 1813, pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ariyo Pakualaman I dan daerah pelenggah ditunjuk yang terbesar disebelah barat sungai progo yang dikenal dengan daerah pasir Urut Sewu. Karena daerah pelenggah letaknya berpencaran maka sentono dalem Pakualam Kyai Kawiredjo I menasihatkan supaya menjadi satu daerah. Setelah disetujui diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan Ibukota di Brosot dan di tunjuk Tumenggung Sosrodigdodjo sebagai bupati pertama. Selang beberapa tahun pada masa Pakualam V memerintahkan pada bupati kedua yaitu R. Riya Wasadirjo agar mengusahakan keringnya daerah rawa Karang Kemuning dan ternyata menjadi daerah persawahan yang Adi (linuih/kelewat) dan kerta (subur-makmur). Karena kondisi itu pada tahun 1877 Kabupaten Karang Kemuning diganti menjadi Kabupaten Adikarta yang beribukota di Bendungan dan selanjutnya pada tahun 1903 pindah ke Wates.

Kabupaten Adikarta meliputi dua distrik yaitu distrik Sogan dan distrik Galur. Distrik Sogan terdiri dari order distrik yaitu Wates dan Temon sementara distrik Galur terdiri dari order distrik yaitu Panjatan dan Brosot<sup>25</sup>.

<sup>25</sup> <http://www.kulonprogo.go.id/v2/files/RPJM.pdf> diakses tgl 16 Juni 2012

Wilayah inilah yang kemudian menjadi perhatian dan sorotan terkenal dengan sebutan Pakualaman Ground (PAG) yang menjadi dasar permasalahan pertambangan pasir besi. Sebetulnya pasca kemerdekaan RI pada tanggal 01 Mei 1951 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Pakualam VIII mengeluarkan maklumat bahwa ada penggabungan dua wilayah yaitu antara Kabupaten Kulon Progo (Kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman) dan karena ketidakberkenanannya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Pakualam VIII kemudian diberi nama Kabupaten Kulon Progo dan beribukota di Wates dan disahkan melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 1950 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 15 Oktober 1951 yang hingga kini masih tetap bertahan.

### **3. Sejarah Pertanian Pesisir Kulon Progo**

Lahan pertanian pesisir Kulon progo merupakan daerah dengan lahan pertanian yang subur dimana tidak banyak yang mengetahui. Pesisir Kulon Progo merupakan wilayah kecil dari propinsi DIY namun menjadi salah satu pemasok utama komoditas hasil-hasil pertanian seperti cabai, padi, terong, semangka, melon dll. Bahkan daerah pesisir ini merupakan pemasok yang cukup penting bagi buah-buahan yang dibutuhkan pada hari-hari tertentu seperti buah naga yang begitu populer dan melonjak permintaannya menjelang perayaan Imlek. Banyak yang tidak percaya jika wilayah pesisir yang merupakan wilayah dengan padang pasir gersang terhampar dengan suhu panas hingga 50°celcius disiang hari dapat ditumbuhi oleh komoditas-komoditas penting bahkan mampu berswasembada hasil-hasil pertanian dan menjadi pemasok yang cukup besar untuk hasil-pertanian tersebut.

Akan tetapi hal yang tidak diduga-duga oleh orang lain justru dapat diwujudkan disana dan tidak sedikit kalangan yang bertanya bagaimana mungkin hal demikian dapat terjadi dan bagaimana lahan gersang menjadi lahan yang subur? Namun pertanyaan tersebut terjawab dengan bukti riil yang ada disana. Masyarakat pesisir menjawab dengan membuktikan semua hal yang bisa dilakukan diatas tanah-tanah yang dikategorikan sebagai tanah subur berlaku sama dengan apa yang bisa dilakukan diatas tanah pesisir yang gersang.

Sejarah pertanian lahan pesisir Kulon Progo sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka sekitar tahun 1942. Ketika Jepang datang menjajah, warga tersebut dilarang menjadikan lahan pesisir menjadi lahan pertanian karena Jepang mencurigai diam-diam warga penggarap membuat garam laut. Ketika Indonesia memproklamkan diri sebagai Negara yang merdeka dan disaat Jepang sudah tidak berada lagi di wilayah pesisir beberapa masyarakat kembali menggarap lahan pesisir untuk mempertahankan hidup mereka. Menurut salah satu warga, pada tahun 1948 Presiden Soekarno pernah datang berkunjung melihat lahan pesisir dan mempersilahkan warganya untuk memanfaatkan lahan.

Setelah dikeluarkan pernyataan tersebut masyarakat kembali datang berbondong-bondong untuk menggarap dilahan pasir pesisir. Pada tahun 1970an terjadi bencana angin yaitu badai yang memporak-porandakan lahan pertanian. Tetapi meski demikian masyarakat tetap bertahan. Masyarakat yang tinggal dipesisir dijuluki sebagai orang-orang cubung yang artinya warga kampung yang tertinggal, masyarakat inferior dan masyarakat marginal

dikarenakan kondisinya yang berpenyakit. Julukan tersebut diberi oleh masyarakat lain diluar masyarakat pesisir. Dikarenakan oleh kencangnya angin yang menerbangkan pasir panas mengakibatkan banyaknya warga yang mengidap penyakit kulit, pernafasan, perut dan mata.

Namun kondisi yang demikian justru membentuk watak bermasyarakat yang baik diantara mereka. Mungkin dikarenakan adanya rasa egalitarian menjadikan masyarakat pesisir memiliki ikatan yang kuat diantara mereka. Salah satu kebiasaan yang rutin mereka jalankan adalah endong-endongan. Endong-endongan adalah kebiasaan berkunjung antar rumah tetangga. Dari kebiasaan ini mereka berkumpul, saling berbagi cerita dan berbagi pengalaman antara satu dengan lainnya. Menurut Mbah Iman salah seorang warga pesisir yang berdomisili di Desa Bugel, hal tersebut merupakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar inilah yang justru menguatkan mereka untuk tetap bertahan menggarap lahan mereka. Kebiasaan yang sarat akan pedagogis seperti kesetiakawanan, kesetaraan dan menjadikan mereka akrab antara satu dengan yang lain. Kebiasaan ini menjadikan mereka saling mempercayai antar sesama mereka dan dari kebiasaan inilah kemudian mereka mulai membicarakan tentang desa dan berupaya untuk dapat memajukan kondisi desa mereka yang tertinggal bila dibandingkan dengan desa-desa didaerah lain. Berbagai gagasan kemudian lahir dalam upaya tersebut dan menghasilkan terobosan untuk menyasati kondisi alam yang ada agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Pada tahun 1984 kelompok warga mulai bergotong-royong membuat ladang sumur sederhana. Karena kondisi tanah pasir yang labil dan mudah longsor mereka membuat lubang dengan diameter yang cukup lebar

yakni sekitar lima meteran dengan kedalaman sekitar lima sampai delapan meter. Teknologi yang mereka gunakanpun masihlah sangat sederhana hanya menggunakan katrol yang terbuat dari bambu. Dan dengan bergantian masyarakat menggali, membuat bedeng untuk kemudian menanami lahan mereka.

Dikarenakan aktivitas bertani yang dikerjakan masyarakat setiap hari dan dengan tantangan kondisi alam yang tidak menentu dan berdampak langsung terhadap turunnya produktivitas tanaman, masyarakat mulai mencari inovasi-inovasi baru dalam bertani dengan jalan eksperimental. Masyarakat mulai menanami pesisir dengan pepohonan untuk menghalau angin yang datang dari laut secara bebas. Hal tersebut memberi dampak positif bagi mereka ataupun bagi pertanian. Tiupan angin laut yang membawa pasir berkurang secara drastis dan lingkungan mereka tempat bermukim yang biasanya wabah penyakit menyerang terutama pada musim kemarau mulai berangsur-angsur berkurang. Dengan dampak positif yang mereka rasakan mereka kemudian melanjutkan pengembangan kepada hal-hal yang lainnya. Inovasi-inovasi pun mulai berkembang dengan pesat, sumur yang awalnya hanya merupakan sumur sederhana mulai dibeton dari yang awalnya hanya menggunakan katrol biasa mulai beralih menggunakan mesin-mesin penyedot air dan untuk lebih memudahkan dalam pekerjaan menyirami tanaman, mereka membuat pipa-pipa saluran agar lebih mudah menjangkau dalam menyirami tanaman.

Demikianlah petani lahan kering di pesisir pantai Kulon Progo, meski mengalami kesulitan yang sangat berat dan pelik tidak menjadikan mereka

menyerah dan patah arang begitu saja, namun justru menguatkan mereka dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Walaupun tanpa ada uluran bantuan dari pemerintah tidak membuat mereka berkecil hati dan putus asa. Sejak dari hanya jalan setapak sebagai akses jalan menuju lahan pertanian mereka, mereka tetap kuat dan bahu-membahu membenahi kondisi yang ada. Sungguh bukanlah perjuangan yang sia-sia bila melihat pada apa yang sudah mereka nikmati kini yang merupakan hasil jerih payah mereka. Bila malam datang mereka bercengkrama bersama seraya bercerita tentang masa lalu, tentang sejarah mereka membangun desa mereka. Mereka bergotong royong bersama-sama membangun desa mereka, jalan setapak dibenahi dengan swadaya warga. Dana untuk membenahi mereka kumpulkan bersama tanpa ada bantuan pemerintah. Demikianlah cerita mereka jika sedang berkumpul dan jika ditanyakan tentang peran pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan mereka. Konflik tanah garapanpun tidak terjadi, petani sangat mengerti dengan apa yang seharusnya menjadi hak mereka dan yang bukan hak mereka. Mereka tidak saling menyerobot lahan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu dikarenakan dalam sektor pertanian merekalah yang mengatur sendiri sehingga mereka dapat mengetahui dengan pasti mana yang menjadi hak mereka masing-masing.

Diatas pasir panas, beraneka-ragam tanaman hortikultura dapat tumbuh dan ditanami sepanjang tahun. Cabai, terong, padi, jarak, kacang panjang, semangka, melon dan beraneka-ragam tanaman lainnya kini tumbuh dengan subur disepanjang pesisir. Jerih payah mereka inipun memberi kontribusi yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan. Pemerintah yang aktif melakukan sosialisasi Global Warming dan menghibau pada masyarakat

untuk menanam tumbuhan hijau, petani pesisir sudah melakukan itu semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sungguh suatu yang ironis jika jerih payah yang mereka lakukan itu dihancurkan hanya melalui beberapa kelompok minoritas yang memiliki kuasa atas kapital tetapi harus mengorbankan kondisi yang sudah tertata dengan baik dan dinamis, apalagi hal tersebut dilakukan berdasarkan legitimasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi dari rakyat namun justru bersikap kontradiktif dengan kepentingan rakyat.



Dalam peta Rencana Kegiatan Pertambangan tersebut menerangkan bahwa terdapat beberapa kawasan yang bukan merupakan tapak pertambangan seperti batas sosial, jalan desa, pemukiman, wilayah transmigrasi dan lain sebagainya. Sedangkan tapak pertambangan (arsiran kuning) pada dalam peta tersebut kenyataannya yang penulis dapati di lapangan merupakan kawasan pertanian masyarakat pesisir.

Secara umum wilayah yang akan dijadikan wilayah pertambangan adalah wilayah pesisir pantai Kulon Progo. Menurut penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, pesisir pantai merupakan areal pemukiman warga, pertanian dan wilayah transmigrasi. Tidak kurang dari 21.322 jiwa yang bermukim di wilayah pesisir<sup>27</sup>. Pertambangan pasir besi yang dilaksanakan oleh PT. Jogja Magasa Iron (JMI) ini mencakup ditiga kecamatan dengan luas masing-masing di kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Galur 3291,24 ha.
- b. Kecamatan Panjatan 4495,23 ha.
- c. Kecamatan Wates 3200,24 ha.

Adapun luas dari tiga kecamatan tersebut yakni 10.950,71 ha<sup>28</sup>. Dengan begitu wilayah kontrak karya menghabiskan 27,3 % dari total luas tanah di kecamatan tersebut.

<sup>27</sup> Bulletin Petani Berlawanan, edisi 1, SEKBER, 2011, hal 3

<sup>28</sup> <http://www.kulonprogo.go.id/v2/files/RPJM.pdf> diakses tgl 16 Juni 2012

## 5. Pertambangan Pasir Besi Oleh PT. Jogja Magasa Iron (JMI)

Ketertarikan perusahaan transnasional terhadap kandungan mineral di pesisir pantai Kulon Progo yaitu kandungan biji besi berawal dari eksplorasi hasil penelitian Mackay dan Schnellman Pty. Ltd, sebuah perusahaan konsultan geologi internasional pada tahun 2006 yang melaporkan dalam lampiran kode JORC (The Joint Ore Reserves Committee Code)<sup>29</sup>, bahwa di pesisir Kulon Progo yang meliputi tiga kecamatan (Galur, Panjatan, Wates) terkandung potensi pasir besi sebanyak 605 juta ton dengan kandungan besi (Fe) 10,8 % dari jumlah total tonase atau setara dengan 65 juta ton besi murni yang tersebar diluasan area 22 km sepanjang pantai dan selebar 1,8 km melebar ke daratan atau seluas 39,6 km persegi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggalian 902 titik penelitian hingga kedalaman 14,6 meter di area tersebut.

Dari hasil penelitian geologis tersebut juga merekomendasikan tentang kandungan pasir besi secara ekonomis yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan tambang yaitu senilai dengan 305 juta ton pasir besi dengan kandungan besi murni mencapai 14,8 % dari total tonase atau mencapai 39 juta ton besi murni dengan kedalaman eksploitasi galian hanya 6 meter dari permukaan. Jika kapasitas produksi mencapai 1 juta ton pertahun maka diseluruh wilayah seluas 39,6 km persegi tersebut dapat dieksploitasi selama 30 tahun berjalan. Paparan inilah yang menjadi dasar kelayakan komersil pertama pada perusahaan PT. Indomines. Ltd serta menjadi laporan

<sup>29</sup> Kode JORC adalah alat untuk membantu geologist untuk menyampaikan resiko yang dihadapi dalam proyek tambang kepada pembuat keputusan finansial yang tidak mengerti geologi. Jika perkiraan sumber daya berdasarkan data yang lemah atau tidak cukup maka resikonya tinggi. Data yang dapat dipercaya dan banyak menghasilkan resiko yang kecil dan perhitungan sumber daya yang akurat. (<http://geofisika-anmul.blogspot.com/2010/04/apa-itu-jorc-code.html>)

perusahaan terhadap publik tentang potensi komoditas pasir besi di Kulon Progo.

Sebelumnya dari hasil eksplorasi penelitian tersebut juga telah menarik minat perusahaan Australia Kimberly Diamond Limited (AKD. Ltd) sebagai cikal bakal perusahaan Indomines Limited (IDO. Ltd) melalui perubahan nama perusahaan untuk berinvestasi. Perubahan nama ini juga merupakan bentuk penegasan investasi Indomines sebagai perusahaan transnasional terhadap investasinya di Indonesia semenjak tahun 2006. Keberadaan PT. Indomines sebagai perusahaan asing dalam pengelolaan kuasa pertambangan dalam bentuk kontrak karya mengharuskan adanya penyesuaian hukum investasi sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pertambangan nomor 11 tahun 1967 tentang acuan kontrak karya serta Undang-Undang Penanaman Modal Asing nomor 25 tahun 2007 yang menjelaskan kedudukan perusahaan asing sebagai hukum formil yang berlaku di Republik Indonesia. Syarat sebagai perusahaan asing sebelum melakukan investasi harus membagi saham (bekerja sama) dengan perusahaan lokal. Dari sini kemudian terbangun aliansi perusahaan antara PT. Indomines. Ltd dari Australia dengan PT. Jogja Magasa Mining (JMM) dari Indonesia yang notabene merupakan perusahaan milik keluarga kesultanan yang melebur dalam satu bentuk joint ventur menggunakan nama PT. Jogja Magasa Iron (JMI)<sup>30</sup>.

Dalam hal ini PT. Jogja Magasa Iron (JMI) dibangun dengan komposisi kepemilikan saham yakni 70% kepemilikan saham dikuasai oleh PT. Indomines. Ltd dari Australia dan 30% sisanya dikuasai oleh PT. Jogja

Magasa Mining(JMM)<sup>31</sup>. Adapun keberadaan PT. JMI adalah sebagai operator eksploitasi pasir besi, produksi pig iron dan serta sebagai media pendistribusian dari hasil kedua perusahaan tersebut. Surat Australia Kimberly Diamond Limited (AKD) kepada The Manager Company Announcements Platform, Australia Stock Exchange Limited (ASX), Sydney, dengan subject: Iron sands-Pig Iron Project-Yogyakarta, Indonesia tetanggal 12 Agustus 2005 menjadi bukti terjalannya kesepakatan bisnis antara Australia Kimberly Diamond yang kemudian berubah nama menjadi PT. Indomines . Ltd pada 2006, Krakatau Steel, dan PT. Jogja Magasa Mining (JMM) perusahaan pertambangan milik keluarga kerajaan Yogyakarta Hadiningrat hal ini berdasarkan pada akte pendirian PT. JMM tertanggal 06 Oktober 2005<sup>32</sup>.

Setelah persiapan untuk melakukan investasi di Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal, sebagai PT. JMI mempersiapkan pengajuan kuasa penambangan kepada pemerintah Republik Indonesia yang kemudian menghasilkan kontrak karya penambangan pasir besi terhadap lahan konsensi penambangan seluas 2987,79 ha. Kontrak karya sebagai legitimasi substansial dalam wilayah yuridis formil karena mengacu pada Undang-Undang Pokok Pertambangan nomor 11 tahun 1967 dan atas nama pemerintah Indonesia ditandatangani oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku pemerintah dan selaku operator tambang PT. JMI pada tanggal 04 November 2008 yang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila diperlukan serta diterangkan sebagai saksi dalam artian yang mengetahui dan menyetujui serta menyatakan memberi kontrak

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> George Junus Aditiendro, "SG dan PIG" *Penumpang Gelap BUKU*, Sinar Harapan tanggal 21 Maret 2011

karya kepada PT. JMI adalah Gubernur atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Setelah mendapatkan izin pertambangan dalam bentuk kontrak karya PT. JMI memasuki lima tahapan proses yang berlangsung semenjak tahun pertama (2008) hingga tahun ketigapuluh (2038), kelima tahapan tersebut adalah :

1. Penyelidikan umum pada tahun pertama (November 2008) dan kedua (November 2010).
2. Eksplorasi pada tahun pertama (November 2008) hingga tahun keempat (November 2013).
3. Studi kelayakan tahun pertama (November 2008) dan tahun kedua (November 2010).
4. Konstruksi tahun pertama (November 2008) hingga tahun ketiga (November 2011).
5. Operasi tahun pertama (November 2008) hingga tahun ketigapuluh (November 2038)<sup>33</sup>.

Dalam kontrak karya juga disebutkan bahwa perusahaan dapat membangun fasilitas proyek sebagai penunjang yaitu berupa fasilitas tambang, fasilitas pengolahan pasir besi, fasilitas peleburan, fasilitas pemurnian, fasilitas

<sup>33</sup> Dapat diperniang berdasarkan keputusan Menteri kontrak karya 2008

pelabuhan khusus, landasan pesawat terbang dan pengangkutan serta penyediaan air untuk keperluan pertambangan<sup>34</sup>.

Sejauh pengamatan penulis memasuki tahun keempat semenjak kontrak karya ditandatangani sebagai fakta dilapangan (wilayah kontrak karya) telah berdiri pilot project yang berdiri di Karang Sewu pada sisi timur serta Karang Wuni pada sisi barat bersebelahan dengan dermaga Glagah yang kini masih sedang dalam proses pembangunan. Adapun fungsi pilot project adalah sebagai wahana penelitian dan pelatihan yang dipersiapkan dan menentukan apakah nantinya penambangan pasir besi bisa diizinkan dan dapat melakukan proses produksi dan eksploitasi dalam skala besar atukah tidak dapat diizinkan oleh pemerintah daerah atas daerah yang telah ditentukan. Namun semenjak berdirinya hingga kini pemerintah samasekali tidak mengeluarkan complain atas fasilitas yang telah dibangun tersebut sehingga dapat diidentifikasi bahwasanya proyek pertambangan pasir besi akan melangkah pada tahapan eksploitasi sesegera mungkin setelah melengkapi seluruh persiapan administratif yang menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan yang tertuang dalam perjanjian kontrak karya pertambangan pasir besi.

<sup>34</sup> Kontrak karya pertambangan Pemerintah Republik Indonesia dan PT. JMI, periode operasi pasal 10 ayat 9